

Perkembangan Kebijakan Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal

Voullin Hamzah¹, Dede Rosyada²

Program Doktorat Manajemen Pendidikan Islam Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

voullin.hz@gmail.com¹, dede.rosyada@uinjkt.ac.id²

ABSTRACT

Formal Diniyah Education (PDF) is a subsystem of the national education system and represents a religious education pathway in the form of madrasah within the scope of Islamic boarding school education (pesantren). Formal Diniyah Education (PDF) is an Islamic religious education program offered at pesantren and operates in a tiered formal education pathway. This education is officially conducted under a tiered structure consisting of elementary, secondary, and higher education levels. This writing employs a literature study method by collecting data from various sources such as books, articles, journals, and relevant archives. PDF policies ensure that students in formal institutions receive the same services as students in other institutions. Formal diniyah education offers educational programs that include general education as well as Islamic education based on the classical Islamic texts (kutub al-turats). To achieve the desired goals, an evaluation of the PDF curriculum is necessary. This evaluation includes the Balance of Religious and General Education, Teaching Quality and Teachers, Curriculum Implementation, Evaluation and Assessment Standards, Life Skills Development, Government Support and Budget Allocation, and Curriculum Innovation.

Keywords: PDF, policy, curriculum

ABSTRAK

Pendidikan Diniyah Formal (PDF) merupakan sub sistem pendidikan nasional dan merupakan jalur pendidikan keagamaan berbentuk madrasah dalam ruang lingkup pendidikan Islam pesantren. Pendidikan Diniyah Formal (PDF) adalah program pendidikan keagamaan Islam yang ditawarkan di pesantren dan berjenjang di jalur pendidikan formal. Ini ditempuh secara resmi di bawah struktur berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Penulisan ini menggunakan metode studi literatur dengan mengumpulkan data, berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal, dan arsip yang relevan. Kebijakan PDF memastikan bahwa siswa di institusi formal menerima layanan yang sama seperti siswa di institusi lain. Pendidikan diniyah formal menawarkan program pendidikan yang mencakup pendidikan umum serta pendidikan Islam yang didasarkan pada kitab kuning (kutub al turats). Untuk mencapai tujuan yang diinginkan perlu dilakukan evaluasi terhadap kurikulum PDF selama ini, adapun evaluasi tersebut meliputi Keseimbangan Pendidikan Agama dan Umum, Kualitas Pengajaran dan Guru, Implementasi Kurikulum, Evaluasi dan Standar Penilaian, Pengembangan Keterampilan Hidup, Dukungan Pemerintah dan Alokasi Anggaran dan Inovasi Kurikulum.

Kata kunci: PDF, kebijakan, kurikulum

PENDAHULUAN

Pendidikan Diniyah Formal (PDF) adalah bentuk pendidikan keagamaan Islam yang berada di dalam dan berjenjang di jalur pendidikan formal. Oleh karena itu, tidak boleh didirikan di luar pondok pesantren. Pendidikan diniyah formal berasal dari beberapa alasan, salah satunya secara filosofis adalah kembalinya khittah pondok pesantren sebagai institusi yang menyiapkan santri untuk tujuan utama berdirinya pesantren, yaitu menjadi mutafaqqih fiddin (ahli ilmu agama Islam). Selama bertahun-tahun, jumlah Madrasah Diniyah telah berkembang menjadi MI (Madrasah Ibtidaiyah), MT (Madrasah Tsanawiyah), dan MA (Madrasah Aliyah). Ini adalah hasil dari SKB Tiga Menteri tahun 1975 yang menyamakan ijazah dan lulusan madrasah dengan ijazah dan lulusan sekelas umum.

Kemerosotan ilmu keislaman di pondok pesantren dapat terjadi sebagai akibat dari perubahan orientasi pendidikan tersebut. Namun, dari perspektif akademik, pendidikan diniyah formal didirikan untuk mempersiapkan santri sebagai ulama intelektual. Dengan kata lain, santri harus mendalami ilmu keislaman dengan pendekatan kontemporer sebagai cara untuk mengatasi kebutuhan krisis ulama (bukan intelektual ulama). Nama pendirian PDF ini secara hukum merupakan institusi pendidikan keagamaan Islam yang formal yang menghasilkan lulusan Mutafaqquh Fiddin (Ahli ilmu agama Islam). Ini dibuat untuk menyelesaikan kekurangan staf Mutafaqquh Fiddin.

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian Kebijakan Pendidikan

Hasbullah (2015) menyatakan bahwa selain mencakup administrasi pemerintah, kebijakan juga berarti menangani masalah atau kepentingan umum. Nugroho (2009) menjelaskan bahwa istilah "kebijakan" mengacu pada tindakan yang didasarkan pada pertimbangan logis selama proses pelaksanaannya. Hogwood dan Gun, dikutip oleh Nanang Fatah, membedakan kebijakan sebagai istilah untuk bidang kegiatan, ekspresi umum dari tujuan atau keadaan yang diinginkan. Fatah (2013) mengatakan bahwa kebijakan dapat berarti keputusan pemerintah, rekomendasi khusus, otorisasi formal, dan program.

Kebijakan yang dimaksud dalam konteks ini terkait dengan pendidikan. Pendidikan, terutama negara, adalah proses yang tidak pernah berakhir. Tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan seseorang. Kebijakan pendidikan sangat penting dan komprehensif, meskipun dalam pengertian yang lebih sempit sering dikaitkan dengan sekolah. Pertimbangan akal sehat serta kebutuhan yang ada di lapangan adalah dasar dalam pembuatan kebijakan. Namun, penting untuk diingat bahwa, meskipun akal manusia memainkan peran dominan dalam proses pengambilan keputusan, sebuah kebijakan juga didasarkan pada pertimbangan akal manusia, baik dari individu maupun kelompok.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang kebijakan pendidikan, termasuk artinya, karakteristiknya, dan implementasi kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan

sekolah dasar di Indonesia. Permasalahan yang sering muncul dalam konteks kebijakan pendidikan nasional mencakup pemahaman tentang esensi dan karakteristik kebijakan pendidikan itu sendiri.

Pendidikan merupakan bagian penting dari kebudayaan dan peradaban manusia, yang terus berkembang seiring waktu bersama dengan kemampuan kreatif dan inovatif manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan merupakan modal utama bagi setiap individu. Oleh karena itu, landasan kebijakan pendidikan berfungsi sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan. Peraturan perundang-undangan negara yang berlaku, yang dibuat oleh pihak yang berwenang dalam bidang pendidikan, sering kali berhubungan dengan landasan tersebut. Kebijakan pendidikan pemerintah, khususnya di Indonesia, didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi.

Pendidikan Islam

Sistem pendidikan Islam bagi umat manusia berfungsi untuk meningkatkan dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam berbagai aspek keislaman. Pendidikan telah digunakan hampir setiap kelompok manusia sepanjang sejarah untuk meningkatkan peradaban dan kualitas hidup. Saat ini, pendidikan Islam sangat penting bagi masyarakat, jadi pemerintah, sebagai penyedia pendidikan formal, terus mengembangkan pendidikan Islam. Mereka berharap bahwa pendidikan agama Islam akan menghasilkan generasi penerus yang bertanggung jawab dan inovatif, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang sangat penting untuk kelangsungan hidup negara yang sedang berkembang. Dalam bukunya "Ilmu Pendidikan Islam", Zakhia Daradjat menyatakan bahwa pendidikan agama Islam adalah proses bimbingan dan asuhan untuk membentuk pemahaman dan praktik ajaran Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup. Ini sangat penting untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat.

Sebagaimana disebutkan oleh Muhaimin (2001), ada setidaknya lima kategori yang dapat diidentifikasi dalam konteks pelaksanaan program dan praktik pendidikan Islam di Indonesia. Pertama, pendidikan di pondok pesantren; kedua, pendidikan di madrasah dan perguruan tinggi lanjutan seperti IAIN/STAIN atau perguruan tinggi Islam yang diawasi oleh Kementerian Agama; ketiga, pendidikan umum dengan nuansa Islam yang ditawarkan oleh yayasan dan organisasi Islam; dan keempat, agama Islam dimasukkan sebagai mata pelajaran atau kuliah di lembaga pendidikan umum. Kelima, pendidikan Islam juga diberikan di rumah, tempat ibadah, dan komunitas belajar Islam, seperti majelis ta'lim. Proses bimbingan sadar oleh guru terhadap pertumbuhan fisik dan spiritual siswa dikenal sebagai pendidikan agama Islam. Tujuan dari pendidikan ini adalah untuk membentuk kepribadian utama yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Islam telah membantu perkembangan pendidikan sejak kedatangannya ke Indonesia pada abad ke-6 M. Beberapa alasan berikut mendukung tindakan ini:

Pertama, Islam adalah agama yang ditunjukkan untuk dakwah dan pendidikan. Dengan karakter ini, agama Islam memiliki tugas untuk mengarahkan, membimbing, dan membentuk kepribadian manusia sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung

dalam ajarannya. Sistem dan lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, dan majelis ta'lim telah didirikan oleh umat Islam yang sesuai dengan zaman mereka. Para ulama, tokoh agama, dan pemimpin masyarakat yang signifikan telah berkontribusi pada kemajuan bangsa melalui lembaga pendidikan ini.

Kedua, terdapat hubungan fungsional antara pendidikan dan ajaran Islam. Berbagai aspek pendidikan, termasuk visi, misi, dan tujuan, didasarkan pada ajaran Islam. Di sisi lain, pendidikan berfungsi sebagai cara yang direncanakan untuk menyebarkan nilai-nilai dan praktik ajaran Islam kepada masyarakat. Fakta bahwa mayoritas orang Indonesia beragama Islam adalah bukti bahwa pendidikan dan dakwah Islam berhasil.

Ketiga, menurut agama Islam, pendidikan adalah cara terbaik untuk meningkatkan martabat manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, ayat 1 hingga 5 dari surat al-'Alaq, yang merupakan ayat pertama yang diturunkan, menunjukkan betapa pentingnya pendidikan. Ini menunjukkan lima komponen pendidikan: proses dan metodologi, peran guru (dalam hal ini Allah SWT), peran murid (dalam hal ini Nabi Muhammad SAW dan umat manusia), sarana prasarana (yang diwakili oleh pena), dan kurikulum (yang mencakup semua yang belum diketahui manusia).

Pendidikan Islam telah menunjukkan fleksibilitasnya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan berorientasi pada masa depan. Ini telah menunjukkan dirinya seimbang, berfokus pada kualitas terbaik, adil, demokratis, dinamis, terbuka, dan bertahan sepanjang hayat. Pendidikan Islam terus mengalami inovasi dari waktu ke waktu karena sifat dan karakteristik tersebut. Mulai dari metode sederhana seperti pendidikan di rumah, surau, langgar, masjid, majelis ta'lim, pesantren, hingga institusi pendidikan tinggi kontemporer. Inovasi pendidikan Islam juga mencakup banyak hal, seperti kurikulum, metode pengajaran, guru, fasilitas, manajemen, dan lainnya. Dengan demikian, pendidikan Islam saat ini memiliki berbagai jenis, tingkat, kualitas, institusi, dan fitur di Indonesia dan di seluruh dunia. Kemajuan ini adalah hasil dari kerja keras umat Islam, tokoh pendidikan, pengelola, dan pemerintah di setiap negara.

Kurikulum

Kurikulum ini berasal dari kata Yunani "*Curere*", yang berarti "tempat berpacu", dan "*Curir*", yang berarti "pelari", yang berarti jarak yang ditempuh seorang pelari (Program et al., 2021). Kurikulum sekarang didefinisikan sebagai sekumpulan bidang studi yang harus dipelajari siswa untuk mendapatkan gelar, seperti yang ditunjukkan oleh rumusan kurikulum ini. Kurikulum sering digunakan sebagai rencana pembelajaran siswa.

Menurut Pasal 19 Ayat 1 dari UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan yang mencakup tujuan, isi, bahan pelajaran, dan metodologi yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Meskipun definisi ini tidak menyebutkan evaluasi secara khusus, itu jelas menunjukkan bahwa evaluasi diperlukan untuk mengukur prestasi akademik.

Menurut PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kurikulum didefinisikan sebagai kumpulan rencana dan pengaturan yang mencakup tujuan, isi, bahan pelajaran, dan metode pembelajaran untuk membantu siswa mencapai tujuan akademik tertentu. Tujuan ini tidak hanya berkaitan dengan tujuan nasional tetapi juga dengan karakteristik, kondisi, dan potensi daerah, institusi pendidikan, dan siswa. Akibatnya, kurikulum institusi pendidikan harus disesuaikan dengan tujuan ini.

Kurikulum terdiri dari beberapa komponen tinjauan konseptual, yaitu sebagai bahan pelajaran, pengalaman belajar, dan rencana pembelajaran. Evaluasi, pelaksanaan, dan perencanaan adalah tiga komponen utama pengelolaan kurikulum. Ide dan struktur kurikulum dirancang dan dilaksanakan oleh pelaksanaan (Nurfardila, Madhakomala, dan Amril, 2014).

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode studi literatur dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti memperhatikan beberapa aspek penting, seperti yang dijelaskan oleh Zed (2008): "Studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi langkah-langkah pengumpulan sumber dari perpustakaan, pembacaan dan pencatatan terhadap sumber-sumber tersebut, serta melakukan ulasan terhadap materi yang telah dikumpulkan sesuai dengan topik yang dibahas"; (1) akses yang jelas terhadap data, teks, dan materi lainnya, tidak hanya melalui penggunaan Untuk mengumpulkan data, berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal, dan arsip yang relevan diperiksa. Metode ini dimaksudkan untuk menemukan sumber terkait dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Diniyah Formal (PDF)

PDF adalah evolusi dari sistem madrasah diniyah di pesantren non-formal ke dalam sistem pendidikan formal. Ini menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum tanpa menghilangkan identitas khas pesantrennya (Suroso, 2017:73). Menurut Wahid (2016:298), PDF dibentuk untuk memperkuat tujuan utama pondok pesantren konvensional, yakni mencetak generasi *mutafaqqih fiddin* atau ahli agama Islam tanpa terpengaruh oleh perubahan zaman.

Pendidikan diniyah formal adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan di pondok pesantren dan memiliki struktur yang berjenjang dan terorganisir seperti jalur pendidikan formal. Oleh karena itu, hanya dapat didirikan di dalam pondok pesantren dan tidak di luarnya. Latar belakang pendidikan diniyah formal terdiri dari beberapa elemen filosofis dan historis.

Secara filosofis, tujuan PDF adalah untuk mengembalikan peran tradisional pondok pesantren sebagai lembaga yang membekali santri dengan pengetahuan agama Islam, sesuai dengan tujuan utama pendirian pondok. Terjadi pergeseran besar dalam sejarah setelah keluarnya SKB tiga Menteri pada tahun 1975, yang menyamakan status ijazah dan lulusan madrasah dengan ijazah dan lulusan sekolah

umum sekelas yang setara. Madrasah diniyah mengalami transformasi besar sebagai akibatnya. Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah menggabungkan pendidikan umum dengan ciri-ciri Islam. Perubahan ini juga mencakup berbagai jenis, jenjang, dan struktur lembaga pendidikan, termasuk pendidikan tinggi di pondok pesantren.

Sebagai tanggapan terhadap kebutuhan akan kader ulama yang memenuhi tantangan zaman, pendidikan diniyah formal bertujuan untuk mempersiapkan santri sebagai ulama intelektual, yaitu santri yang memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu keislaman dengan cara berpikir modern.

Menurut undang-undang, PDF adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang bersifat formal yang bertujuan untuk menghasilkan sarjana yang mahir dalam agama Islam untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja yang mampu mempelajari agama. PMA tersebut berisi penjelasan lebih lanjut tentang PDF.

PDF adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan di pondok pesantren secara sistematis dan berjenjang dalam jalur pendidikan formal, seperti yang dijelaskan dalam Bab I, Pasal 1, Ayat 7. Siswa diwajibkan untuk mukim atau tinggal di pondok pesantren atau dayah, mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga tingkat pendidikan tinggi. sebagai bagian dari upaya untuk menyelesaikan pendidikan dasar wajib.

Persyaratan teknis awal untuk membuat PDF termasuk jumlah minimal santri yang mukim selama sepuluh tahun terakhir, serta persyaratan administratif lainnya. Dalam PDF ini, ada perbedaan antara pendidikan diniyah non-formal yang dilakukan di dalam atau di luar pesantren.

PDF ini dibuat karena dianggap bahwa lulusan sekolah umum dan madrasah tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan ahli keilmuan Islam. Hal ini karena Al-Quran-Hadits, Fiqh, Aqidah-Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab adalah lima mata pelajaran yang diajarkan dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan dengan mata pelajaran umum di madrasah. Tidak menerima layanan pendidikan pesantren dianggap tidak mampu menghasilkan lulusan yang mampu menjadi ulama, *mutafaqqih fiddin*, atau ahli dalam ilmu agama Islam. Dengan tegas, lulusan sekolah umum dan madrasah tidak sepenuhnya mampu dalam situasi ini.

Sebaliknya, upaya Kemenag untuk memformalkan pendidikan di pesantren melalui PDF dapat dianggap sebagai pengakuan dan legalisasi peran pesantren dalam mendidik generasi muda bangsa. Dewasa ini, orang lebih suka anak-anak yang belajar di pesantren atau dayah tradisional juga mendapatkan ijazah yang diakui secara formal, sehingga mereka lebih mudah melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.

Menurut Grand Design PDF, yang dibuat oleh Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, PDF adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang resmi. Tujuannya adalah untuk menciptakan ahli ilmu agama Islam, atau *mutafaqqih fiddin*, sebagai tanggapan atas kekurangan staf mereka. Selain itu, PDF bertujuan untuk memberikan pengaruh sipil kepada dunia pesantren dalam hal konservasi dan pengembangan. Secara khusus, sekolah dan institusi pendidikan formal lainnya hanya mengadakan

dua hingga tiga jam pelajaran agama per minggu. Sebaliknya, Al-Quran dan Hadits, Akidah dan Akhlak, Fiqh, dan Sejarah Budaya adalah lima mata pelajaran yang digunakan untuk mengajar agama di madrasah.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6036 tahun 2015 mengenai kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan diniyah formal Ulya, PDF memuat kurikulum yang disusun oleh pemerintah untuk diterapkan, dan juga merupakan standar nasional.

Kurikulum ini disusun khusus untuk pesantren dan didistribusikan dalam PDF. Selain itu, kurikulum PDF berbasis pada landasan yuridis dan filosofis. Secara filosofis, kurikulum PDF merujuk pada tradisi pesantren di Indonesia, yang menekankan pada nilai-nilai kultural moderat untuk mencetak generasi ulama yang kompeten atau *mutafaqqih fid din*, dengan berfokus pada pemahaman kitab kuning. Pengembangan kurikulum PDF juga memperhatikan peserta didik sebagai subjek pengetahuan, memungkinkan mereka belajar dari kyai atau guru serta melalui interaksi dengan sesama santri, komunitas, dan sumber belajar lainnya.

Dari segi hukum, pengembangan kurikulum PDF didasarkan pada: 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; dan 5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014.

Untuk mencapai tujuan utama, struktur kurikulum PDF menggabungkan kompetensi dasar seperti sikap religius, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Susunan mata pelajaran termasuk mata pelajaran agama, umum, dan muatan lokal. Waktu mingguan, durasi pertemuan, jumlah materi yang dipelajari setiap semester, dan kalender akademik diatur secara terinci. Pusat menentukan kelompok mata pelajaran agama dan umum, sementara pesantren membuat muatan lokal berdasarkan karakteristik, potensi, dan keunggulan mereka sendiri.

Perbedaan kurikulum Madrasah dengan kurikulum PDF secara umum yaitu, ilmu umum menyumbang 75% dan ilmu agama 25%, sedangkan di sekolah diniyah formal, ilmu umum menyumbang 25%. Dengan demikian, dengan eksistensi yang diperkuat dan pengembangan pesantren salafiyah yang diizinkan secara luas, khittah pesantren salafiyah akan lebih terfokus. Hal ini menunjukkan bahwa akan lebih mudah untuk memastikan inovasi yang sesuai dengan kekhasan masing-masing di pesantren.

Evaluasi Terhadap Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal (PDF)

Adapun evaluasi terhadap kurikulum PDF yang selama ini berjalan adalah :

1. Keseimbangan Pendidikan Agama dan Umum

Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal (PDF) berhasil menciptakan keseimbangan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Hal ini memungkinkan santri untuk mendapatkan pengetahuan agama yang mendalam serta keterampilan yang relevan untuk dunia kerja modern. Namun, porsi pelajaran umum yang lebih kecil dibandingkan dengan sekolah

umum dapat membatasi pengetahuan dan keterampilan santri di bidang non-agama .

2. Kualitas Pengajaran dan Guru

Kualitas pengajaran dalam PDF sangat bergantung pada kompetensi guru. Masalah yang sering muncul adalah kekurangan guru yang memiliki kualifikasi baik dalam ilmu agama maupun ilmu umum. Hal ini berdampak pada kualitas pendidikan yang diterima oleh santri. Pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru perlu ditingkatkan untuk mengatasi masalah ini.

3. Implementasi Kurikulum

Implementasi kurikulum PDF menunjukkan bahwa meskipun ada kebebasan dalam penyusunan kurikulum, tetap diperlukan panduan dan standar yang jelas dari pemerintah. Kebijakan dan regulasi yang jelas diperlukan untuk memastikan bahwa kurikulum PDF diterapkan secara konsisten di semua pesantren. Evaluasi berkala terhadap implementasi kurikulum juga penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul.

4. Evaluasi dan Standar Penilaian

Evaluasi dalam PDF, terutama untuk mata pelajaran umum, mungkin kurang seragam dan komprehensif dibandingkan dengan sekolah umum. Standar penilaian yang tidak konsisten dapat mengakibatkan variasi dalam kualitas pendidikan yang diterima santri. Perlu adanya standar penilaian yang lebih ketat dan seragam untuk memastikan bahwa semua santri mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan .

5. Pengembangan Keterampilan Hidup

Salah satu kekuatan PDF adalah fokus pada pengembangan keterampilan hidup yang relevan dengan tuntutan pasar kerja dan kebutuhan masyarakat. Namun, integrasi antara pengajaran kitab kuning dengan keterampilan hidup modern perlu terus ditingkatkan agar santri dapat lebih siap menghadapi tantangan zaman.

6. Dukungan Pemerintah dan Alokasi Anggaran

Dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan, regulasi, dan alokasi anggaran sangat penting untuk keberhasilan PDF. Alokasi anggaran yang setara dengan sekolah formal di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren. Akreditasi lembaga PDF juga perlu dipercepat untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut memenuhi standar pendidikan yang diharapkan.

7. Inovasi Kurikulum

Inovasi dalam kurikulum PDF diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan identitas khas pesantren. Pengembangan kurikulum yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan zaman modern dapat membantu PDF tetap relevan dan efektif dalam mencetak generasi ulama yang kompeten.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perubahan dan perkembangan zaman terjadi dengan cepat, dan hal yang sama berlaku untuk perbaikan dan kemajuan dalam masyarakat. Satuan pendidikan harus mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan dan pembaruan tersebut. Faktor-faktor seperti gaya hidup manusia, nilai moral, seni, dan agama sangat dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena kedua aspek ini menduduki posisi sentral dalam transformasi sosial.

Inovasi Kurikulum PDF Kurikulum PDF harus terus berinovasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kultural pesantren dan mencetak generasi ulama yang kompeten.

Dukungan Pemerintah perlu memberikan dukungan yang memadai, baik dari segi kebijakan, anggaran, maupun pengembangan kelembagaan, agar PDF dapat berkembang dengan baik.

Masa Depan PDF Dengan inovasi kurikulum dan dukungan pemerintah yang memadai, PDF diharapkan dapat menjadi lembaga pendidikan Islam yang mampu mencetak generasi ulama yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Beberapa hal strategis yang diperlukan dalam mengimplementasikan kurikulum PDF, diantaranya :

1. Pengembangan Kurikulum.

Kurikulum PDF harus berfokus pada pengembangan keterampilan hidup untuk memenuhi tuntutan pasar kerja dan kebutuhan masyarakat, di samping penguasaan kitab kuning.

2. Komunikasi Efektif

Kementerian Agama perlu melakukan komunikasi yang efektif melalui saluran resmi untuk membentuk citra positif tentang Pendidikan Diniyah Formal. Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, terutama Direktorat Pendidikan Madrasah dan Pondok Pesantren, perlu merumuskan pedoman yang lebih jelas mengenai arah, tujuan, dan orientasi PDF.

3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dan pembiayaan PDF harus setara dengan sekolah formal atau madrasah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam, paragraf 11 pasal 44 a, Kementerian Agama harus memastikan bahwa alokasi anggaran dan pembiayaan PDF setara dengan sekolah formal atau madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama.

4. Akreditasi Lembaga

Kementerian Agama harus segera memulai proses akreditasi untuk semua lembaga PDF guna memenuhi persyaratan sertifikasi guru dan ustadz, sesuai dengan PMA No 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, paragraf 11 pasal 44 ayat 1 dan 2.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Wahid (2016). Pendidikan Diniyah Formal, Wajah Baru Pendidikan Pesantren untuk Kaderisasi ulama. *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, Volume 7 Nomor 2
- Asynul Zumarti (2023). Penerapan Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal Pondok Pesantren Di Kabupaten Kampar. Diakses dari <https://repository.uin-suska.ac.id>
- Insani, F. D. (2019). Sejarah Perkembangan Kurikulum Di Indonesia Sejak Awal Kemerdekaan Hingga Saat Ini. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 8(1), 43–64. <https://doi.org/10.51226/assalam.v8i1.132>
- Iskandar, S., Rosmana, P. S., Nurhuda, A. A., Fitriani, M. G., Fatimah, R., Febriyanti, R., & Ramadhani, S. (2023). Sejarah Perkembangan Kurikulum yang Diterapkan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, 1–13.
- Kompas.com. (2021, 17 Agustus). Perkembangan Sejarah Pendidikan di Indonesia. Diakses tanggal 28 Maret 2021, dari https://www.kompas.com/stori/read/2021/08/17/100000979/perkembangan-sejarah-pendidikan-di-indonesia?page=all#google_vignette
- Notosusanto, Nugroho dan Marwati Djoened Poesponegoro. (2019). *Sejarah Nasional Indonesia VI Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia (1942-1998)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Santoso, S. (2021, 25 Maret). 5 Prioritas Kebijakan Pendidikan untuk Memajukan Pembelajaran di Indonesia. Diakses tanggal 28 Maret 2021, dari <https://rise.smeru.or.id/id/blog/5-prioritas-kebijakan-pendidikan-untuk-memajukan-pembelajaran-di-indonesia>
- Susanti, M., Rahmadona, T., & Fitria, Y. (2023). Studi Literatur: Perbedaan Penilaian Kurikulum 2013 dengan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Basicedu*, 7(1), 339–350.
- Syukron, A., Samsudi, S., & Kustiono, K. (2020). Pendidikan Diniyah Formal : a Formal Curriculum for Pesantren in Indonesia. *Innovative Journal of Curriculum and Educational Technology*, 9(2), 63-71.